



RILIS
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI DALAM RANGKA PENINJAUAN PEMBANGUNAN
BALI MARITIME TOURISM HUB (BMTH)
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024-2025
TANGGAL 14 – 16 NOVEMBER 2024

Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024/2025 yang dilaksanakan di Kota Denpasar, Provinsi Bali pada tanggal 14 sampai dengan 16 November 2024 dalam rangka peninjauan pembangunan *Bali Maritime Tourism Hub* (selanjutnya disingkat BMTH) yang dilakukan oleh PT Pelindo (Persero). Tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI yaitu Anggia Erma Rini yang didampingi oleh pimpinan Komisi VI DPR RI yaitu A.M. Nurdin Halid dan Eko Hendro Purnomo serta diikuti oleh anggota Komisi VI DPR RI dari seluruh unsur fraksi. Dalam kunjungan kerja tersebut, hadir jajaran Mitra Kerja Komisi VI DPR RI yaitu Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik, Kementerian BUMN RI, Desti Arlaini serta Direktur Utama PT Pelindo (Persero), Arif Suhartono, beserta jajaran.

Kunjungan kerja spesifik diawali dengan peninjauan lapangan ke lokasi BMTH, dalam hal ini adalah pelabuhan Benoa. Pada saat kunjungan lapangan, delegasi kunjungan kerja menerima penjelasan/presentasi dari Prasetyo, Direktur Strategi Pelindo terkait kondisi eksisting BMTH termasuk didalamnya kegiatan operasional yang dilakukan serta rencana-rencana pengembangan kedepannya. Selain itu, anggota delegasi kunjungan kerja Komisi VI DPR RI juga melihat secara langsung dermaga BMTH serta aktivitas sandar *cruise* termasuk menggali permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan seperti singkatnya waktu singgah, ketidakmampuan *cruise* untuk menaikkan penumpang di dalam negeri Indonesia serta kurang optimalnya pemberdayaan UMKM dan masyarakat lokal.

Kegiatan kunjungan kerja dilanjutkan dengan pertemuan dengan jajaran direksi PT Pelindo (Persero) untuk menggali informasi secara lebih mendalam terkait kinerja Pelindo serta pembangunan BMTH. Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI DPR RI menyoroti terkait kurangnya sinergi BMTH dengan para pelaku/*stakeholders* pariwisata seperti penyedia jasa atraksi wisata, *travel agent* dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan paket wisata yang lebih menarik agar minat wisatawan mengeksplor Bali lebih meningkat dan dapat memperpanjang *length of stay* di Bali. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga menyoroti terkait pemberdayaan pelaku UMKM di BMTH yang dinilai belum optimal. Oleh karena itu, kedepannya Pelindo diharapkan lebih meningkatkan partisipasi pelaku UMKM setempat dalam ekosistem BMTH dan menjadikan pelaku UMKM sebagai bagian utama dari ekosistem tersebut (bukan hanya menjadi pelengkap). Terakhir, Komisi VI DPR RI meminta Pelindo agar proses relokasi nelayan perikanan dalam rangka pengembangan BMTH dilakukan secara cermat dengan mempersiapkan lokasi baru yang memadai serta memperhatikan aspek sosial ekonomi nelayan tersebut untuk menghindari potensi konflik di masa mendatang.

Jakarta, 16 November 2024

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI
Ke Kota Denpasar, Provinsi Bali